# IV. GAMBARAN UMUM

## A. PT. *Sugar Group Companies (SGC)* Korporasi Besar di Lampung.

### I. Pabrik Gula Terbesar se-Asia Tenggara.

PT. *Sugar Gruop Companies (SGC)* merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri gula. PT. *Sugar Gruop Companies (SGC)* terdiri dari 4 anak perusahaan, yaitu PT. Gula Putih Mataram (GPM), PT. Sweet Indo Lampung (SIL) dan PT. Indo Lampung Perkasa (ILP) merupakan perusahaan penghasil gula, sedangkan PT. Indo Lampung Distillery (ILD) merupakan perusahaan penghasil etanol. Berita ini dimuat dalam Tribun News (Tribun News, 31 Mei 2014).

PT. *Sugar Group Companies (SGC)* memiliki anak Perusahaan yang terdiri dari beberapa divisi kerja. PT. Gula Putih Mataram (GPM) memiliki lima (5) divisi kerja. PT. Sweet Indo Lampung (SIL) juga memiliki lima (5) divisi kerja. PT. Indo Lampung Perkasa (ILP) hanya memiliki empat (4) divisi kerja. Data ini dimuat dalam situs Radar Lampung (Radar Lampung, 31 Mei 2014).

PT. *Sugar Group Companies (SGC)* mampu menghasilkan 450.000 ton gula per tahun dengan masa panen tebu yang berlangsung setiap 11 bulan. PT. *Sugar*

*Group Companies (SGC)* menargetkan produksi gula 500.000 ton pada tahun 2013. Jumlah ini merupakan 20 % dari total produksi gula nasional. PT. *Sugar Group Companies (SGC)* memiliki 50.000 pekerja. Berita ini dimuat dalam situs Radar Lampung (Radar Lampung, 31 Mei 2014).

PT. *Sugar Group Companies (SGC)* memiliki lahan perkebunan tebu yang terbentang melintasi Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Tulang Bawang. PT. *Sugar Group Companies (SGC)* merupakan sebuah perusahaan yang terintegrasi dari perkebunan tebu dan pabrik gula. PT. *Sugar Group Companies (SGC)* memiliki jaringan bisnis yang terdiri dari pabrik gula dan etanol (Radar Lampung, 31 Mei).

PT. *Sugar Group Companies (SGC)* memiliki *brand* (merek) produk gula yang diberi nama "GULAKU". Produk "GULAKU" memiliki dua (2) jenis warna yaitu: Pertama, warna gula kekuningan. Warna gula kekuningan merupakan produk "GULAKU" yang berasal dari PT. Gula Putih Mataram (GPM). Kedua, wana gula putih. Warna gula putih merupakan produk "GULAKU" yang berasal dari PT. Sweet Indo Lampung (SIL). Perbedaan jenis teknologi yang digunakan untuk pemrosesan tebu merupakan penyebab perbedaan warna gula. PT. *Sugar Gruop Companies (SGC)* mampu menghasilkan 20 % gula pasir nasional. PT. *Sugar Group Companies (SGC)* dapat dikatakan sebagai "Raja Gula Pasir" di Indonesia. PT. *Sugar Group Companies (SGC)* juga merupakan perusahaan penghasil gula paling besar di Asia Tenggara (Tribun News, 31 Mei 2014).

PT. *Sugar Group Companies (SGC)* memiliki rencana untuk mengembangkan industri gula di luar negeri. Anthony Salim melalui *First Pasific Co* memiliki

rencana untuk membeli pabrik gula di Filipina. Anthony Salim ingin memperkokoh bisnis gulanya di Asia Tenggara. Anthony Salim tidak ingin kehilangan momentum *free trade agreement* di kawasan tersebut. Chief Executive Officer First Pasific Manuel Pangilinan, mengatakan produsen gula harus berkonsolidasi akibat sengitnya persaingan. Hal ini merupakan akibat persaingan tarif yang dikenakan ke produsen gula. Berikut ini adalah kutipan Manuel Pangilinan dalam situs Okezone (Okezone, 7 Juni 2014), yaitu:

> "Marjin keuntungan dari pabrik gula di Filipina tidak menarik akibat besarnya ongkos produksi. Hal ini membuat perusahaan produsen gula di negara tersebut tidak efisein.
> First Pacific sendiri sudah memiliki perusahaan penyedia bahan baku gula terbesar di negara tersebut, yakni Roxas Holdings Ind dan refiner terbesar, Victorias Millin Co."

Perkembangan Negara Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan kapitalisme Indonesia. Sebuah kelas kapitalis domestik dan modal milik negara merupakan faktor-faktor yang sangat penting dalam membentuk sejarah kontemporer. Prestasi terbesar yang pernah dilakukan oleh Richard Robinson adalah melacak para kapitalis domestik di Indonesia modern. Para kapitalis modern tersebut adalah etnis Tionghoa dan segmen "Pribumi" serta perusahaan-perusahaan milik negara dan modal asing (Richard Robinson dalam Edward Aspinall, 2013:21).

PT. *Sugar Group Companies (SGC)* merupakam kapitalis modern yang berasal dari etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa masih mendominasi lahan bisnis swasta di Indonesia. PT. *Sugar Group Companies (SGC)* berperan penting sebagai

perusaahaan yang mampu menghasilkan 20 % kebutuhan gula nasional di Indonesia.

## II. Lahan Perkebunan PT. *Sugar Group Companies (SGC)* Luas

PT. *Sugar Gruop Companies (SGC)* berkembang dengan sangat pesat. Perkembangan PT. *Sugar Group Companies (SGC)* diawali dengan berdirinya PT. Sweet Indo Lampung (SIL). PT. Sweet Indo Lampung (SIL) berdiri pada tahun 1994. Pada tahun 1995 berdirilah PT. Indo Lampung Perkasa (ILP) yang dilanjutkan dengan pendirian PT. Gula Putih Mataram (GPM) dan PT. Indo Lampung Distillery (ILD). Letak PT. Gula Putih Mataram (GPM) dan PT. Indo Lampung Distillery (ILD) sangat dekat. Bahan baku utama PT. Indo Lampung Distillery (ILD) merupakan molasses yang diperoleh langsung dari PT. Gula Putih Mataram (GPM). Data ini diperoleh dalam situs Para Tokoh Lampung (Para Tokoh Lampung, 28 Mei 2014).

PT. *Sugar Gruop Companies (SGC)* memiliki areal perkebunan yang sangat luas. PT. *Sugar Gruop Companies (SGC)* memiliki luas areal perkebunan hampir mencapai 65.000 Ha. Areal perkebunan membentang sepanjang 70 km dengan lebar 25 km. PT. *Sugar Gruop Companies (SGC)* juga memiliki landasan pacu yang cukup untuk pergerakan pesawat tipe capung. Pesawat terbang juga membantu meringankan pekerjaan karyawan, seperti pemupukan jalur udara, *rippening*. Data ini dimuat dalam situs Radar Lampung (Radar Lampung 31 Mei 2014).

PT. *Sugar Group Companies (SGC)* memiliki Hak Guna Usaha (HGU) atas tanah seluas 75.667,4041 Ha. PT. Sweet Indo Lampung (SIL) memiliki sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 43. PT. Sweet Indo Lampung (SIL) memiliki luas tanah sebesar 12.860,66 Ha dan penambahan Hak Guna Usaha (HGU) sebesar 133,835 Ha. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kanwil Badan Pertahanan Nasional (BPN) Lampung Nomor 5540.001.08.2002, jumlah total luas tanah PT. Sweet Indo Lampung (SIL) adalah sebesar 12.994,495 Ha. PT. Indo Lampung Perkasa (ILP) memiliki luas tanah sebesar 21.401,40 Ha. PT. Indo Lampung Perkasa (ILP) memiliki sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 10/BPN/-TB/2006 dengan luas tanah sebesar 8.500,5091 Ha. Data ini dimuat dalam situs Haluan Lampung (Haluan Lampung, 31 Mei 2014).

Data tentang luas lahan PT. *Sugar Group Companies (SGC)* yang dimiliki oleh PT. *Sugar Group Companies (SGC)* berbeda dengan luas lahan berdasarkan izin Bupati Tulang Bawang yang terbit pada tahun 2004. Hal ini sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kabupaten Tulang Bawang tanggal 8 Maret 2007. PT. *Sugar Group Companies (SGC)* memiliki jumlah total Hak Guna Usaha (HGU) seluas 86,45 Ha. Jumlah total yang dimiliki oleh PT. *Sugar Group Companies (SGC)* di wilayah Tulang Bawang adalah sebesar 124.092 Ha. Perbedaan jumlah luas tanah adalah 124.094 - 86.45 = 34.637 Ha. Perbedaan jumlah total luas lahan PT. *Sugar Group Companies (SGC)* adalah sebesar 34.637 Ha. Data tersebut berbeda dengan data yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. (Beritanda, 5 Juni 2104).

Perbedaan jumlah luas lahan mengundang perhatian Aliansi Masyarakat Peduli Pajak (AMPP) untuk melakukan *longmarch*. Aliansi Masyarakat Peduli Pajak (AMPP) menggelar aksi *longmarch* dari jalan Kartini (depan mall Kartini), jalan Jendral Katamso, jalan Raden Inten, jalan Diponegoro, jalan Cut Mutia, jalan Wolter Mongonsidi dan berakhir di kantor DPRD Provinsi Lampung. Aksi ini bertujuan untuk menemui DPRD agar bisa menindak tegas tentang penggelapan pajak yang dilakukan oleh PT. *Sugar Group Companies (SGC).* Menurut Koordinator Lapangan M. Kiki, penggelapan pajak dilakukan dengan modus memalsukan jumlah luas lahan perkebunan tebu yang dimiliki oleh PT. *Sugar Group Companies (SGC)* sejak tahun 2004. Berikut ini adalah pendapat M. Kiki yang dimuat dalam situs Beritanda (Beritanda, 5 Juni 2014), yaitu:

> "Dengan aksi ini, AMPP Lampung untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat, LSM dan penggiat anti korupsi Lampung untuk bersama-sama mendesak penegak hukum baik di tingkat pusat maupun daerah agar secepatnya memproses pelaku penggelapan pajak PT. SGC dan menghimbau kepada masyarakat Lampung untuk memboikot seluruh produk PT. SGC, sebagai bentuk penolakan rakyat Lampung atas perusahaan asing di bumi Lampung"

Kita dapat melihat bahwa para kapitalis asing dan Tionghoa memiliki hubungan erat dalam kekuasaan politik. Secara tidak langsung, para kapitalis asing dan Tionghoa memiliki hubungan erat dalam kekuasaan politik. Hal ini justru memberikan ruang bagi sebuah negara yang kuat sebagai penengah dan membantu menyediakan prasyarat dalam pertumbuhan kapitalisme. Ironisnya, dalam sebuah negara kapitalis tempat untuk kelas kapitalis (pribumi) nyaris tidak ada. Situasi ini menuntut kelas kapitalis (pribumi) untuk tampil mandiri (Richard Robinson dalam Aspinall, 2013:22).

Kelas kapitalis (pribumi) tampil mandiri bekerja di PT. *Sugar Group Companies (SGC)* sebanyak 50. 000 orang. PT. *Sugar Group Companies (SGC)* sebagai kapitalis modern yang berasal dari etnis Tionghoa memiliki hubungan erat dengan kekuasaan politik. Negara menyediakan segala persyaratan bagi akumulasi modal dan campur tangan dalam berbagai perselisihan diantara elemen-elemen modal yang berbeda dan saling bersaing. Otonomi negara dan para pejabatnya terkait dengan kemajuan kelas kapitalis di Indonesia dan dominasi elemen-elemen asing dan Tionghoa. Kita dapat melihat data tentang luas lahan PT. *Sugar Group Companies (SGC)* yang dimiliki oleh PT. *Sugar Group Companies (SGC)* berbeda dengan luas lahan berdasarkan izin Bupati Tulang Bawang yang terbit pada tahun 2004. PT. *Sugar Group Companies (SGC)* juga berani menanam tebu di lahan milik negara.

## III. Izin Hak Guna Usaha (HGU)

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 28 ayat 1 tentang Undang-Undang (UU) Pokok Agraria (UUPA), Hak Guna Usaha (HGU) merupakan hak khusus untuk mengusahakan tanah yang bukan miliknya sendiri atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. Hak Guna Usaha (HGU) juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai atas Tanah. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 mengatur tentang Hak Guna Usaha (HGU) secara lebih mendalam.

Menurut data yang dimuat dalam Hukum Properti (Hukum Properti, 29 Mei), orang yang dapat memiliki Hak Guna Usaha (HGU) merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum (BH) yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Apabila pemilik Hak Guna Usaha (HGU) sudah tidak memenuhi syarat tersebut, pemilik Hak Guna Usaha (HGU) diberikan jangka waktu satu (1) tahun untuk wajib melepaskan atau mengalihkan Hak Guna Usaha (HGU) tersebut kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Apabila pemilik Hak Guna Usaha (HGU) tidak melepaskan atau mengalihkan, maka Hak Guna Usaha (HGU) akan terhapus secara resmi dan status tanah berubah kembali menjadi tanah negara.

Tanah Negara merupakan tanah yang diberikan sebagai Hak Guna Usaha (HGU). Hak Guna Usaha (HGU) hanya dapat diberikan untuk kebutuhan pertanian, perikanan atau peternakan. Hak Guna Usaha (HGU) dapat diberikan untuk tanah dengan luas minimal 5 Ha. Apabila luas tanah yang memiliki Hak Guna Usaha (HGU) mencapai 25 Ha atau lebih, maka pemilik Hak Guna Usaha (HGU) harus menggunakan investasi modal yang layak dengan teknik perusahaan yang baik sesuai dengan perkembangan zaman yang berlaku. Hak Guna Usaha (HGU) tidak dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain namun Hak Guna Usaha (HGU) dapat dibebani dengan Hak Tanggungan. Hak Guna Usaha (HGU) harus didaftarkan untuk menjamin kepastian hukum. Pendaftaran Hak Guna Usaha (HGU) meliputi: *Pertama*, pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah. *Kedua*, Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut. *Ketiga*, pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat (Legal Akses, 29 Mei 2014).

Hak Guna Usaha (HGU) dapat diperoleh dengan jangka waktu paling lama 25 tahun. Hak Guna Usaha (HGU) juga dapat diberikan kepada perusahaan yang memerlukan waktu lebih lama dengan jangka waktu paling lama 35 tahun. Hal ini dapat disesuaikan dengan permintaan pemilik Hak Guna Usaha (HGU) dan keadaan perusahaan. Hak Guna Usaha (HGU) dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 25 tahun. Berikut ini adalah syarat yang harus dipenuhi oleh pemilik Hak Guna Usaha (HGU) untuk mengajukan perpanjangan dan pembaharuan Hak Guna Usaha (HGU), yaitu: *Pertama*, tanahnya masih diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan pemberian hak tersebut. *Kedua*, syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak. *Ketiga*, pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak. Data ini diperoleh dalam situs Kompas (Kompas, 31 Mei 2014).

Hak Guna Usaha (HGU) dapat diperoleh sejak terdaftar di Kantor Pertanahan dalam buku tanah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hak Guna Usaha (HGU) dapat diperoleh berdasarkan Penetapan Pemerintah yaitu dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri (yang bertanggung jawab di bidang pertanian/agraria) atau pejabat yang ditunjuk. Berikut ini adalah objek Hak Guna Usaha (HGU) menurut Hukum Properti (Hukum Properti, 29 Mei 2014), yaitu:

a. Jika tanah yang akan diberikan Hak Guna Usaha (HGU) merupakan tanah negara yang merupakan kawasan hutan, maka pemberian Hak Guna Usaha (HGU) baru dapat dilakukan setelah tanah tersebut dilepaskan dari statusnya sebagai kawasan hutan.

b. Pemberian Hak Guna Usaha (HGU) atas tanah yang telah memiliki hak tertentu baru dapat dilaksanakan setelah diselesaikannya pelepasan hak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan yang berlaku.
c. Jika diatas tanah yang akan diberikan Hak Guna Usaha (HGU) terdapat tanaman atau bangunan milik pihak lain yang keberadaannya berdasarkan atas hak yang sah, maka pemegang Hak Guna Usaha (HGU) yang baru wajib memberikan ganti kerugian kepada pemilik bangunan dan tanaman tersebut.

Hak Guna Usaha (HGU) dapat terhapus secara resmi. Hal ini telah diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 40 Tahun 1996. Berikut ini adalah sebab-sebab terhapusnya Hak Guna Usaha (HGU), yaitu:

a. Berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangannya.
b. Dibatalkan haknya oleh pejabat yang berwenang sebelum jangka waktunya berakhir karena:
    1. Tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan/atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan sebagimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan/atau Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996.
    2. Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
c. Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir.
d. Dicabut berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1961.

e. Diterlantarkan.

f. Tanahnya musnah.

g. Pemegang Hak Guna Usaha (HGU) tidak lagi memenuhi syarat untuk dapat mempunyai Hak Guna Usaha (HGU) sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

Luas tanah Hak Guna Usaha (HGU) yang dimiliki oleh PT. *Sugar Group Companies (SGC)* adalah seluas 75.667,4041 Ha. PT. Sweet Indo Lampung (SIL) memiliki sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 43. PT. Sweet Indo Lampung (SIL) memiliki luas tanah sebesar 12.860,66 Ha dan penambahan Hak Guna Usaha (HGU) sebesar 133,835 Ha. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kanwil Badan Pertahanan Nasional (BPN) Lampung Nomor 5540.001.08.2002, jumlah total luas tanah PT. Sweet Indo Lampung (SIL) adalah sebesar 12.994,495 Ha. PT. Indo Lampung Perkasa (ILP) memiliki luas tanah sebesar 21.401,40 Ha. PT. Indo Lampung Perkasa (ILP) memiliki sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 10/BPN/-TB/2006 dengan luas tanah sebesar 8.500,5091 Ha. PT. Garuda Panca Arta (GPA) memiliki sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 8 dan 9. PT. Garuda Panca Arta memiliki luas tanah sebesar 28.800 Ha. PT. Mulia Kasih Sejati (KMS) dan PT. Indo Lampung Cahaya Makmur memiliki sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 3. PT. Mulia Kasih Sejati (KMS) memiliki luas tanah sebesar 2.771 Ha. PT. Indo Lampung Cahaya Makmur (ILCM) memiliki luas tanah sebesar 12.260,09 Ha. Data ini disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertahanan Nasional (BPN) M. Najib Taufieq yang dimuat dalam situs Haluan Lampung (Haluan Lampung, 31 Mei 2014).

Data yang diberikan oleh Badan Pertahanan Nasional (BPN) bertolak belakang dengan data yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang (Pemkab). Mantan Bupati Tulang Bawang, Abdurahman Sarbini meminta Badan Pertahanan Nasional (BPN) untuk mengukur ulang luas tanah Hak Guna Usaha (HGU) yang dimiliki oleh PT. *Sugar Group Companies (SGC).* Mantan Bupati Tulang Bawang telah mengirimkan surat kepada Badan Pertahanan Nasional (BPN) pada tanggal 18 Februari 2011 dan 31 Maret 2011. Surat tersebut berisi tentang hal permohonan pengukuran kembali (ukur ulang) lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang dimiliki oleh PT. *Sugar Group Companies (SGC)*. Informasi ini diperoleh dari situs Haluan Lampung (Haluan Lampung, 31 Mei 2014).

M. Najib Taufieq membenarkan bahwa mantan Bupati Kabupaten Tulang Bawang pernah mengajukan permohonan pengukuran kembali (ukur ulang) lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang dimiliki oleh PT. *Sugar Group Companies (SGC)*. M. Najib Taufieq membenarkan pernyataan tersebut melalui Surat Nomor 1092/9-18-300/X/2013. Berikut ini adalah tanggapan Najib yang dimuat dalam Haluan Lampung (Haluan Lampung, 31 Mei 2014), yaitu:

> "Badan Pertahanan Nasional (BPN) akan melakukan ukur ulang, jika syarat-syaratnya sudah memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta menanggung biaya seperti yang diatur Peraturan Pemerintah Nomor 13 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak.
> "Jadi Kami menunggu saja. Jika memang ada permintaan ukur ulang terhadap lahan SGC dan sudah memenuhi syarat, pasti akan kami lakukan." Kata Najib melalui surat yang diterima redaksi Haluan Lampung, Jumat (25/10)."

Pengaruh *Economic Base* terhadap keseluruhan *Political Superstructure* merupakan salah satu tema sentral dalam teori Marx dan Engels. Berdasarkan

cara pandang strukturalis ini, negara menggambarkan *Economic Base* dalam sebuah masyarakat. Sebuah negara dapat berkembang bila disertai dengan pembagian kerja sosial di masyarakat. Sehingga melahirkan kelas dominan dan subordinan. Marx juga menulis “mereka adalah penguasa yang dalam segala usia telah sesuai dengan kondisi ekonomi, tetapi tidak pernah diberikan hukuman kepada mereka” (Marx dalam Hiarej, 2003:273-274).

PT. *Sugar Group Companies (SGC)* merupakan kelas dominan. Kelas dominan memiliki kemampuan yang lebih besar mengendalikan negara. Pemilik PT. *Sugar Group Companies (SGC)* merupakan penguasa di Kabupaten Tulang Bawang. PT. *Sugar Group Companies (SGC)* belum bersedia untuk melakukan pengukuran kembali (ukur ulang) lahan Hak Guna Usaha (HGU). Pemerintah tidak berani mengambil langkah tegas untuk memberikan hukuman yang menyangkut Hak Guna Usaha (HGU) milik PT. *Sugar Group Companies (SGC).*

## IV. Penyumbang Dana Kampanye SBY

PT. *Sugar Group Companies (SGC)* salah satu perusahaan penghasil gula ternama di Indonesia. PT. *Sugar Group Companies (SGC)* juga memiliki 4 anak perusahaan yang terdiri dari beberapa divisi kerja. PT. *Sugar Group Companies (SGC)* memiliki 50.000 pekerja. PT. *Sugar Group Companies (SGC)* dipimpin oleh seorang Direktur Utama. Direktur Utama PT. *Sugar Group Companies (SGC)* bernama Gunawan Yusuf.

Gunawan Yusuf lahir di Jakarta pada tanggal 6 Juni 1954. Gunawan Yusuf merupakan Direktur Utama PT. *Sugar Gruop Companies (SGC)* pada tahun 2002

sampai sekarang. PT. *Sugar Group Companies (SGC)* merupakan perusahaan gula yang terintegrasi dari perkebunan tebu sampai pabrik gula. PT. *Sugar Gruop Companies (SGC)* memiliki 4 anak perusahaan yang terdiri dari: PT. Gula Putih Mataram (GPM), PT. Sweet Indo Lampung (SIL), PT. Indo Lampung Perkasa (ILP), PT. Indo Lampung Distillery (ILD). Gunawan Yusuf juga merupakan Direktur utama PT. Makindo pada tahun 1997 sampai sekarang. PT. Makindo merupakan perusahaan perdagangan dan distribusi tercatat di Bursa Efek Jakarta & Bursa Efek Surabaya (Sekarang keduanya digabung menjadi bursa efek Indonesia) dari 1997-2007 (Para Tokoh Lampung, 28 Mei 2014).

Gunawan Yusuf sebagai pemilik PT. Makindo tidak membayarkan dana kepada nasabah Toh Keng Siong. Toh Keng Siong sebagai pemilik dana telah menyimpan dana dalam bentuk Time Deposit Information (TDC). Toh Keng Siong menyimpan dana sebesar US$ 134 Juta (Sekitar Rp 1.3 Triliun) di PT. Makindo. Dana tersebut jatuh tempo pada 1 November 2002. PT. Makindo tidak membayarkan kepada pemilik dana yang berhak. Kemudian, Gunawan Yusuf telah melakukan pembayaran terakhir cicilan utang kepada Toh Keng Siong pada 6 Maret 2003 sebesar US$ 5 Juta. Gunawan Yusuf membantah tudingan Toh Keng Siong melalui pengacaranya. Toh Keng Siong melaporkan kasus pidana penggelapan dan penipuan yang dilakukan oleh Gunawan Yusuf ke Mabes Polri pada tanggal 20 April 2004. Mabes Polri kemudian mengeluarkan SP3 sejak laporan diserahkan oleh Toh Keng Siong. Beberapa kalangan menduga terjadinya pembiaran kasus ini selama bertahun-tahun merupakan faktor kedekatan Gunawan Yusuf dengan keluarga cendana dan orang-orang yang berpengaruh di Istana Negara (Citizen Jurnalism, 10 Juli 2014).

Menurut berita yang dimuat dalam situs Citizen Jurnalism (Citizen Jurnalism, 10 Juli 2014), Gunawan Yusuf telah dekat dengan kekuasaan istana negara sejak awal pemerintahan Presiden Soeharto. Gunawan Yusuf juga dikenal dekat dengan putra-putri Presiden Soeharto. Gunawan yusuf juga dekat dengan orang-orang yang berpengaruh pada masa Pemerintahan Presiden Soeharto. Penggelapan dana yang dilakukan Gunawan Yusuf mengalir pada kampanye pemilihan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Gunawan Yusuf tercatat sebagai salah satu penyandang dana terbesar kampanye Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres). Dana yang dimiliki oleh Toh Keng Siong sebesar US$ 134 Juta (Sekitar Rp 1.3 Triliun) di PT. Makindo.

PT. *Sugar Group Companies (SGC)* sering menjadi penyokong dana dalam Pemilihan Kepala Daerah (pemilukada) di Provinsi Lampung baik pemilihan Bupati maupun pemilihan Gubernur. PT. *Sugar Group Companies (SGC)* juga berperan untuk menyumbang dan membiayai seluruh operasional Partai Demokrat (PD) di Provinsi Lampung melalui karyawannya yang ditempatkan sebagai Ketua Partai Demokrat Lampung. Banyak pihak menduga bahwa uang yang digunakan oleh Gunawan Yusuf merupakan uang hasil penipuan. Uang yang selama ini dibagi-bagikan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) oleh PT. *Sugar Group Companies (SGC)* merupakan uang hasil dari penipuan. Informasi ini dimuat dalam situs Citizen Jurnalism (Citizen Jurnalism, 10 Juli 2014).

Menurut Peneliti Indonesia Economic Development Studies (IEDS) Musyafaur Rahman yang dimuat dalam Edisi News (Edisi News, 03 Juni 2014), asumsi dan dugaan tentang kedekatan Gunawan Yusuf dengan lingkar kekuasaan istana

negara belum pernah terbukti secara yuridis. Foto Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama Gunawan Yusuf di PT. Indo Lampung Distellery (ILD) merupakan fakta yang menunjukkan bagaimana kalangan tersebut selalu lepas dari jerat hukum. Berikut ini adalah pernyataan Musyafaur Rahman yang dikutip dalam situs Edisi News (Edisi News, 03 Juni 2014), yaitu:

> "Akhirnya pertanyaan kembali terlontar ke KPK, mampukah mereka (KPK) menepis rumor dan membongkar berbagai kasus penggemplangan pajak ini untuk dikonversi menjadi pendapatan negara untuk kesejahteraan rakyat? Mengingat figur layaknya Gunawan Yusuf ini tidak hanya 1 di Republik Indonesia"

Menurut Mantan Bupati Tulang Bawang Abdurachman Sarbini yang dimuat dalam situs Satgatnas (Satgatnas, 3 Juni 2014), kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) PT Garuda Panca Arta (GPA) tahun 2001-2011 adalah sebesar Rp. 9.712.414.368.000 (9,7 Triliun). Sehingga jumlah total PPN dan PPH yang dimiliki oleh PT. Garuda Panca Arta (GPA) sejak tahun 2001-2011 adalah sebesar 16. 673.566.368.000 (16,7 Triliun). Sedangkan jumlah PPN dan PPh dari anak perusahaan PT. *Sugar Group Companies (SGC)*, yaitu PT. Gula Putih Mataram (GPM) adalah sebesar Rp. 3.048.259.368 dari luas lahan 24.147 Ha. Jumlah total PPN dan PPh secara khusus PT. Garuda Panca Arta (GPA) dan PT. Gula Putih Mataram (GPM) yang memiliki utang pajak kepada negara adalah sebesar Rp. 19.721.826.274.368.

Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak masih belum menanggapi kasus utang pajak yang dilakukan oleh PT. *Sugar Group Companies (SGC)* pada tahun 2012-2013. Menurut Kepala Seksi Hubungan Eksternal Ditjen Pajak Direktorat Humas Chandra Budi, menanggapi kasus utang pajak yang dilakukan oleh PT. *Sugar*

*Group Companies (SGC)* akan melanggar Undang-Undang (UU). Berikut ini adalah berita yang dimuat dalam situs Aktual (Aktual, 3 Juni 2014), yaitu:

> "Melalui pesan singkat kepada Aktual.co hari ini, Senin (24/6), Kepala Seksi Hubungan Eksternal Ditjen Pajak Direktorat Humas, Chandra Budi tidak mau menanggapi kasus tersebut. Dia beralasan, jika menanggapi hal tersebut akan melanggar Undang-Undang.
> "Saya tidak dapat memberikan informasi soal hal tersebut, karena ada aturan kerahasiaan di jabatan kita, sebagaimana diatur dalam pasal 34 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUHP)," katanya."

Menurut Ferli Yuledi, S.P, M.M selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Tulang Bawang, pihaknya akan melakukan penertiban terhadap seluruh perusahaan di Tulang Bawang. Pernertiban yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) bertujuan untuk meningkatkan hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2014. Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada thaun 2013 mengalami penurunan. Pihaknya akan lebih ketat terhadap perusahaan agar hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat tercapai sesuai dengan target yang ditentukan. Informasi ini diperoleh dalam situs Lampung Newspaper (Lampung Newspaper, 28 Juni 2014).

Selama kurang lebih 30 tahun terakhir negara memainkan peran menentukan dalam pembangunan ekonomi dan melindungi pemilik modal. Negara tetap menjalankan fungsi penting sebagai penyedia kerangka regulasi yang memungkinkan pasar bebas bekerja secara optimal. Fungsi penting tersebut berhubungan dengan kebijakan-kebijakan menjamin disiplin fiskal, mengurangi belanja publik, reformasi pajak, liberalisasi finansial, mendorong nilai tukar yang kompetitif, liberalisasi perdagangan, melancarkan investasi asing, privatisasi

perusahaan negara, deregulasi ekonomi dan perlindungan terhadap *Property Rights* (Hiariej, 2006:116).

Menurut pendapat Hiariej (2006:105), kebijakan pemerintah berhubungan erat dengan mobilisasi dana dari sumber-sumber Internasional. Pemerintah mengintegrasikan perekonomian Indonesia kedalam proses globalisasi keuangan. Penyebab utama pengintegrasian ini adalah meningkatnya ketergantungan kapitalisme terhadap modal segar. PT. *Sugar Group Companies (SGC)* memiliki modal segar yang dibutuhkan oleh Pemerintah.

Gunawan Yusuf sebagai pemilik PT. *Sugar Group Companies (SGC)* merupakan salah satu penyumbang dana kampanye Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah presiden Republik Indonesia (RI) selama 2 periode masa jabatan (2004-2009 dan 2009-2014). Secara tidak langsung, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memainkan peran menentukan dalam pembangunan ekonomi dan melindungi pemilik modal. PT. *Sugar Group Companies (SGC)* juga sering menjadi penyokong dana dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) di Provinsi Lampung baik pemilihan Bupati maupun pemilihan Gubernur. PT. *Sugar Group Companies (SGC)* juga berperan untuk menyumbang dan membiayai seluruh operasional Partai Demokrat (PD) di Provinsi Lampung melalui karyawannya yang ditempatkan sebagai Ketua Partai Demokrat Lampung. Pemerintah telah melakukan kerjasama dengan PT. *Sugar Group Companies (SGC)* sebagai pemilik modal.

## B. Aktor Politik PT. *Sugar Group Companies (SGC)*

Kesuksesan PT. *Sugar Group Companies (SGC)* sebagai perusahaan penghasil gula paling besar di Asia Tenggara, tidak terlepas dari jerih payah orang-orang yang bekerja keras. Orang-Orang tersebut bekerja keras dan disiplin untuk menjadikan PT. *Sugar Group Companies (SGC)* dapat menjadi perusahaan besar. Orang-orang yang berperan penting dalam kesuksesan PT. *Sugar Group Companies (SGC)* adalah Gunawan Yusuf, Fauzi Toha dan Ridho Ficardo.

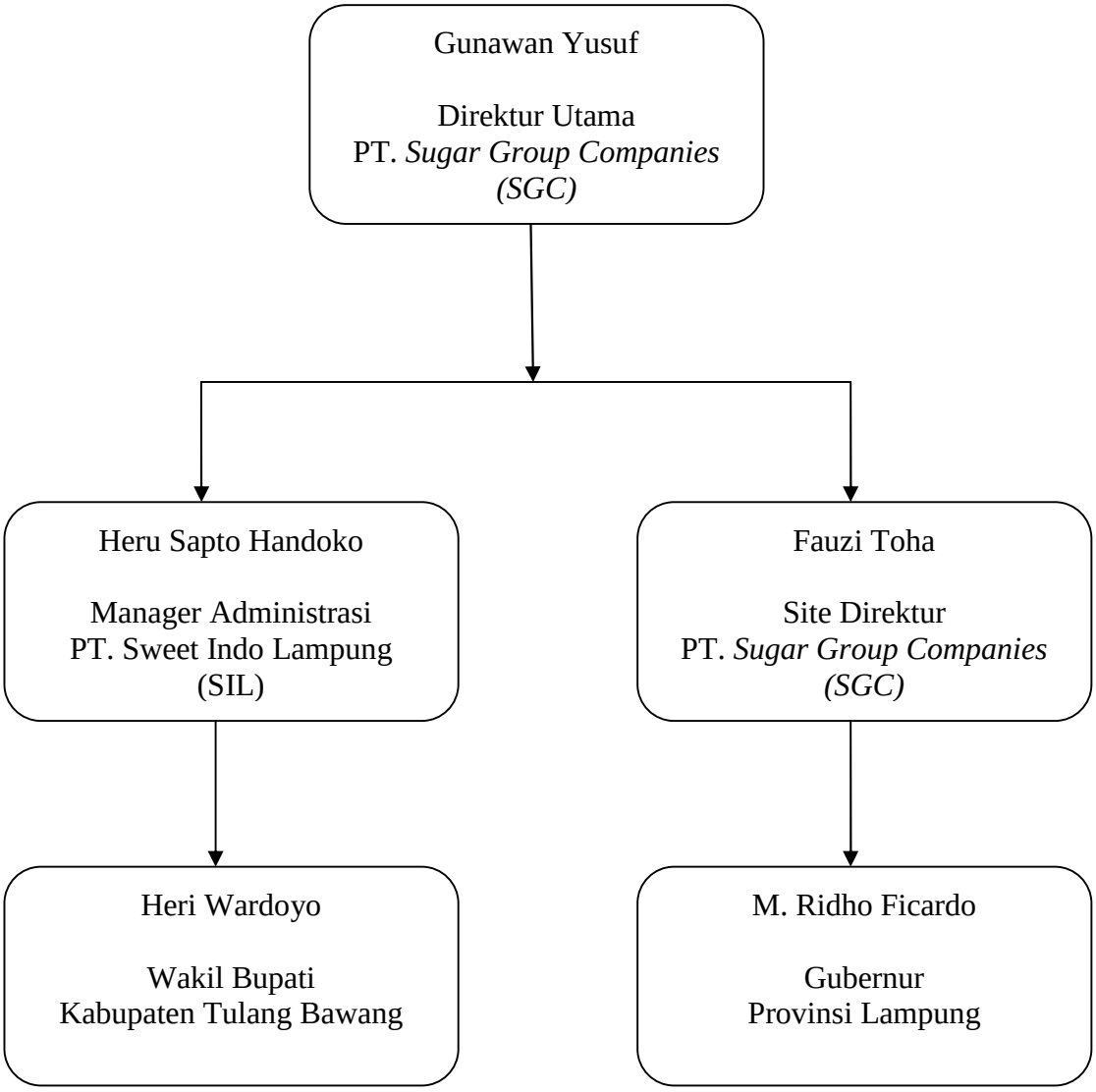


Gambar 3. Aktor Politik PT. *Sugar Group Companies (SGC)*

Gunawan Yusuf lahir di Jakarta pada tanggal 6 Juni 1954. Gunawan Yusuf merupakan seorang pria berkewarganegaraan Indonesia. Gunawan Yusuf mampu menguasai bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Membaca dan olahraga merupakan hobi yang dimiliki oleh Gunawan Yusuf. Gunawan Yusuf adalah orang yang menyadari arti penting dari pendidikan. Gunawan Yusuf kuliah di University of California (Long Beach), USA Bachelor of Science, Civil Engineering tahun 1977. Gunawan Yusuf melanjutkan pendidikan Pascasarjana di Universitas yang sama. Gunawan Yusuf melanjutkan kuliah di University of California (Long Beach), USA Master of Science, Civil Engineering. Gunawan Yusuf merupakan seroang pria yang memiliki karir yang cemerlang (Para Tokoh Lampung, 28 Mei 2014).

Gunawan Yusuf merupakan Direktur Utama PT. *Sugar Gruop Companies (SGC)* pada tahun 2002 sampai sekarang. PT. *Sugar Group Companies (SGC)* merupakan perusahaan gula yang terintegrasi dari perkebunan tebu sampai pabik gula. PT. *Sugar Gruop Companies (SGC)* memiliki 4 anak perusahaan yang terdiri dari: PT. Gula Putih Mataram (GPM), PT. Sweet Indo Lampung (SIL), PT. Indo Lampung Perkasa (ILP), PT. Indo Lampung Distillery (ILD). Gunawan Yusuf juga merupakan Direktur Utama PT. Makindo pada tahun 1997 sampai sekarang. PT. Makindo merupakan perusahaan perdagangan dan distribusi tercatat di Bursa Efek Jakarta & Bursa Efek Surabaya (Sekarang keduanya digabung menjadi bursa efek Indonesia) dari 1997-2007. Data ini diperoleh dari situs Para Tokoh Lampung (Para Tokoh Lampung, 28 Mei 2014).

Fauzi Thoha memiliki nama lengkap Ir. M. Fauzi Thoha. Fauzi Thoha lahir tanggal 11 April 1950 di Tulung Agung. Fauzi Thoha memeluk agama Islam. Ayahnya bernama H. M. Thoha Sofyan dan ibunya bernama Hj. Chrisny. Fauzi Thoha memiliki seorang istri yang bernama Hj. Agustina Fauzi. Fauzi Thoha memiliki tiga (3) orang anak, yaitu: *Pertama*, M. Ridho Ficardo, S.Pi., M.Si. *Kedua*, Silvy Noviana, S.E. *Ketiga*, Gita Farina, S.Si. Setiap orang pasti memiliki motto hidup, tak terkecuali dengan Fauzi Thoha. Fauzi Thoha memiliki 3 (tiga) motto hidup, yaitu: *Pertama*, bekerja itu ibadah. *Kedua*, berhenti adalah mati. *Ketiga*, mensyukuri nikmat Allah. Fauzi Thoha merupakan pria yang hobi berolahraga. Tenis dan jogging merupakan olahraga kegemaran Fauzi Thoha (Para Tokoh Lampung, 28 Mei 2014).

Fauzi Thoha menyelesaikan pendidikan SD (Sekolah Dasar) Negeri 3 Tulung Agung pada tahun 1962. Kemudian Fauzi Thoha menyelesaikan pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama) Negeri 1 Tulung Agung pada tahun 1965. Fauzi Thoha melanjutkan pendidikan SMA (Sekolah Menegah Atas) Negeri 1 Tulung Agung dan lulus pada tahun 1968. Institut Pertanian Bogor (IPB) merupakan Universitas Negeri yang dipilih oleh Miftah Thoha untuk melanjutkan pendidikannya. Fauzi Thoha mengambil jurusan teknologi pertanian yang merupakan program studi 6 Tahun. Fauzi Thoha menyelesaikan kuliahnya pada tahun 1976 (Para Tokoh Lampung, 28 Mei 2014).

Muhammad Ridho Ficardo merupakan anak kandung dari Bapak Fauzi Thoha. Ridho Ficardo lahir pada tahun 1980 di Kota Bandar Lampung. Ridho Ficardo mengenyam pendidikan TK, SD dan SMP di Gunung Madu Perkasa (GMP).

Ridho Ficardo melanjutkan pendidikan ke SMA Al-Kautsar Bandar Lampung. Ridho Ficardo menyelesaikan pendidikan SMA pada tahun 1998. Ridho Ficardo mengambil gelar S1 di Universitas Padjajaran. Ridho Ficardo mengambil jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Pertanian. Sekarang jurusan tersebut berada di Fakultas Perikanan. Ridho Ficardo menyelesaikan pendidikan S1 pada tahun 2003. Ridho Ficardo melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Indonesia. Ridho Ficardo mengambil jurusan Intelijen. Jurusan tersebut merupakan program kerjasama antara Universitas Indonesia (UI) dan Badan Intelijen Nasional (BIN). Ridho Ficardo mengenyam pendidikan S2 selama 3 tahun dan lulus pada tahun 2006. Ridho Ficardo mengambil jurusan ilmu politik di Universitas Indonesia untuk melanjutkan pendidikan S3 (Para Tokoh Lampung, 28 Mei 2014).

Heru Sapto Handoko lahir pada tanggal 21 Januari 1985. Heru Sapto Handoko adalah manajer administrasi PT. Sweet Indo Lampung (SIL) yang merupakan anak perusahaan PT. *Sugar Group Companies (SGC)*. Heru Sapto Handoko juga merupakan saudara kandung Heri Wardoyo. Heri Wardoyo merupakan Bupati Tulang Bawang (Para Tokoh Lampung, 28 Mei 2014).

Heri Werdoyo, S.H lahir pada tanggal 28 Mei 1967 di Tanjung Karang. Heri Wardoyo memiliki seorang istri yang bernama Zaidirina, S.E., M.Si. Hri Wardoyo memiliki tiga orang yang bernama Asyraf Vivaldi Wardoyo, Athaya Calista Sastyaviana dan Admiral El-GAhaziy Wardoyo. Program Pascasarjana Jurnalistik Dr. Soetomo merupakan pendidikan terakhir yang ditempuh oleh Heri Wardoyo. Heri Wardoyo pernah meraih peghargaan Pemegang sertifikat Ahli Dewan Pers

Nasional 2009 Dewan Pers RI. Heri Wardoyo merupakan Wakil Bupati Tulang Bawang (Para Tokoh Lampung, 28 Mei 2014).

Tabel 1. Pengalaman Kerja Aktor Politik PT. *Sugar Group Companies (SGC)*

| NO | Nama | Tahun | Jabatan | Perusahaan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunawan Yusuf | 1993-1997 | Insinyur Sipil | California, USA |
| | | 1993-2003 | Direktur | PT. Garuda Panca Arta |
| | | 1997-sekarang | Direktur Utama | PT. Makindo |
| | | 1999-2000 | Komisaris | PT. Satelit Palapa Indonesia |
| | | 2000-sekarang | Komisaris | PT. Makindo Strategic Assets |
| | | 2000-sekarang | Komisaris Utama | PT. Makindo Technology |
| | | 2000-sekarang | Komisaris | PT. Makindo Securities |
| | | 2002-sekarang | Direktur Utama | PT. *Sugar Group Companies (SGC)* |
| | | 2003-sekarang | Direktur Utama | PT. Garuda Panca Arta (GPA) |
| 2 | Fauzi Thoha | 1976-1993 | Plantation Manager | PT. Gunung Madu Plantation |
| | | 1994-1997 | Deputy General Manager | PT. Sweet Indo Lampung (SIL) |
| | | - | Deputy General Manager | PT. Indo Lampung Perkasa (ILP) |
| | | 1997-2002 | Technical Director | PT. Tiara Adi Kencana |
| | | - | Technical Director | PT. Kerry Plt Service Indonesia |
| | | - | Director | PT. Tidar Sungkar Sawit |
| | | - | Director | PT. Mustika Sembuluh |
| | | 2002-sekarang | Site Director | PT. *Sugar Group Companies (SGC)* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Ridho Ficardo | - | Mengajar | Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) |
| | | - | Mengajar | Universitas Indonesia (UI) |
| | | - | Mengajar | Pusdik Intel Polri |
| | | - | Kursus | Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) |
| | | - | Ketua Dewan Perwaiklan Daerah (DPD) | Partai Demokrat |
| | | 2014-2019 | Gubernur | Provinsi Lampung |

Sumber: Para Tokoh Lampung

Tabel 2. Pengalaman Organisasi Aktor Politik PT. *Sugar Group Companies (SGC)*

| NO | Nama | Tahun | Jabatan | Organisasi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunawan Yusuf | 1991 | Bendahara | Asosiasi Wakil Penjamin Efek |
| | | 1992 | Anggota Komite Perdagangan | PT. Bursa Efek Jakarta |
| | | 1993-1996 | Redaktur Ahli | Majalah Info Pasar Modal |
| | | 1995-2001 | Anggota Komite Ketua Umum | Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI) |
| | | 1998-2001 | Ketua Bidang Hubungan Kebursaan dan Kelembagaan | Asosiasi Emiten Indonesia |
| | | 1998-2001 | Anggota Tim Pengkajian | Asosiasi Emiten Indonesia |
| | | 2001-2004 | Anggota Dewan Penasehat | Asosiasi Emiten Indonesia |
| 2 | Ridho Ficardo | - | Ketua | Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) |
| | | - | Anggota aktif | Praja Muda Karana |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | (Pramuka) |
| | | - | Dewan Kerja Nasional | Praja Muda Karana (Pramuka) |
| | | 1999 | Ketua Perkemahan | Bakti Dirgantara |
| | | 2003 | Ketua Adat Agung | Praja Muda Karana (Pramuka) |

Sumber: Para Tokoh Lampung

Lahirnya kelas kapitalis domestik yang lebih kuat *vis-à-vis* modal Internasional maupun Negara merupakan sebuah era yang mungkin belum menandai kemenangan modal. Justru hal ini menandai tahapan lebih lanjut kebangkitan modal. Kaum kapitalis Indonesia mampu beradaptasi dengan sangat cepat dan mudah dengan demokratisasi di tengah ancaman signifikan terhadap kapitalisme atau kepemilikan pribadi. Kemampuan Demokrasi Indonesia menyerap dan mengakomodasi para elit politik yang berkuasa, sebagian melalui korupsi dan distribusi patrionase. Tentu saja hal ini menjadi salah satu kunci keberhasilan demokrasi di Indonesia (Aspinall, 2013:31).

Lahirnya kaum kapitalis domestik menandai kebangkitan modal di Indonesia. Kaum kapitalis Indonesia mampu beradaptasi dengan sangat cepat dan mudah dengan demokratisasi ditengah ancaman signifikan terhadap kapitalisme atau kepemilikan pribadi. Gunawan Yusuf, Heru Sapto Handoko, Heri Wardoyo, Fauzi Thoha dan Ridho Ficardo adalah kaum kapitalis yang berasal dari PT. *Sugar Group Companies (SGC)*.

## C. PT. PLN (Persero) di tengah Buruknya Pelayanan Publik.

### I. Unit Bisnis PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung

Provinsi Lampung memiliki jumlah daratan sekitar $\pm$ 35.288,35 KM. Provinsi Lampung terdiri dari 12 Kabupaten dan 2 Kota. Provinsi Lampung memiliki 2.331 desa/kelurahan. Kebutuhan pasokan listrik di Provinsi Lampung sudah mencapai 774 MW. Jumlah desa/kelurahan yang telah dialiri listrik adalah sebesar 1.533 desa/kelurahan. Jumlah desa/kelurahan yang belum dialiri listrik adalah 624 desa/kelurahan. Provinsi Lampung membutuhkan pasokan daya listrik dalam jumlah yang cukup besar (Teras Lampung, 7 Juni 2014).

Provinsi Lampung memiliki rasio elektrifikasi yang relatif rendah. Provinsi Lampung hanya memiliki rasio elektrifikasi sebesar 72 %. Jumlah tersebut masih di bawah rata-rata rasio elektrifikasi nasional sebesar 78 %. Kondisi ini menyebabkan banyaknya kantung-kantung atau pemukiman penduduk yang belum dialiri listrik. Pernyataan ini diungkapkan oleh Direktur Perencanaan dan Pembinaan Afilasi PT. PLN (Persero) Murtaqi Syamsudin dalam situs Indoinfrastructure (Indoinfrastructure, 10 Juni 2014).

Provinsi Lampung memiliki jumlah penduduk yang menjadi pelanggan listrik milik PT. PLN (Persero) adalah sebanyak 1.471.887 jiwa. Perbandingan rata-rata pelanggan adalah satu banding empat jiwa. Daya tersambung sebesar 1.836 kVA. Konsumsi listrik sebesar 254,4 GWh/bulan. Data milik PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung ini diperoleh dalam situs Antara Sumsel (Antara Sumsel, 10 Juni 2014).

PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung terletak di Jl. Z.A Pagar Alam, No. 05 Bandar Lampung. Informasi pembayaran tagihan rekening listrik serta informasi pengaduan pelanggan demi mewujudkan kemudahan dan kenyamanan bagi pelanggan dalam menikmati listrik dengan akses tanpa batas. Berikut ini adalah contact center PLN 123, yaitu:

a. Situs www.pln.co.id
b. Telpon (kode area) 123
c. Email 123@pln.co.id
d. Facebook PLN 123
e. Twitter @pln_123

PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung merupakan salah satu unit bisnis PT. PLN (Persero) yang memiliki 5 Unit Pelaksana. Unit Pelaksana PT. PLN (Persero) terdiri dari 3 Area (Area Tanjung Karang, Area Metro, dan Area Kota Bumi), 1 Area Pengatur Distribusi, dan 1 Unit Pelaksana Konstruksi Kelistrikan Lampung. PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung memiliki 21 Rayon, yaitu:

1. Area Tanjung Karang memiliki 7 Rayon (Karang, Natar, Teluk Betung, Way Halim, Sutami, Sidomulyo dan Kalianda)
2. Area Metro memilki 9 Rayon (Kota Metro, Bandar Jaya, Pringsewu, Kalirejo, Talang Padang, Sukadana, Kota Agung, Rumbia dan Sribawono)
3. Area Kota Bumi memiliki 5 Rayon (Bumi Abung, Blambangan Umpu, Menggala, Bukit Kemuning dan Liwa)

Tabel 3. Rayon dibawah PT. PLN (Persero) Area Tanjung Karang:

| NO | Rayon | Melayani |
|---|---|---|
| 1 | Rayon Karang | Tanjung Karang Barat, Tanjung Karang Pusat, Tanjung Karang Timur dan Kemiling. |
| 2 | Rayon Wayhalim | Rajabasa, Sukabumi, Sukarame, Kedaton dan Tanjung Senang. |
| 3 | Rayon Teluk Betung | Padang Cermin, Punduh Pidada, Kelumbayan, Kelumbayan Barat, Panjang, Teluk Betung Barat, Teluk Betung Selatan dan Teluk Betung Utara. |
| 4 | Rayon Sutami | Tanjung Bintang, Tanjung Sari, Way Panji, Way Sulan, Waway Karya dan Merbau Mataram. |
| 5 | Rayon Natar | Natar, Tegineneng, Jati Agung dan Negeri Katon. |
| 6 | Rayon Sidomulyo | Sidomulyo, Katibung, Penengahan dan Merbau Mataram. |
| 7 | Rayon Kalianda | Bakauheni, Candipuro, Kalianda, Ketapang, Palas, Rajabasa dan Sragi. |

Sumber: PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung

Tabel 4. Rayon dibawah PT. PLN (Persero) Area Metro.

| NO | Rayon | Melayani |
|---|---|---|
| 1 | Rayon Kota Metro | Metro Barat, Metro Pusat, Metro Timur, Trimurjo, Batanghari, Batanghari Nuban, Metro Kibang, Pekalongan, Raman Utara, Sekampung, Sekampung Udik dan Sukadana. |
| 2 | Rayon Bandar Jaya | Bandar Mataram, Bandar Surabaya, Bangunrejo, Bekri, Bumi Nabung, Bumi Ratu Nuban, Gunung Sugih, Selagai Lingga, Terbanggi Besar, Terusan Nunyai, Way Pangubuan dan Way Seputih. |
| 3 | Rayon Pringsewu | Adi Luwih, Ambarawa, Banymas, Gading Rejo, Pagelaran, Pringsewu, Sukoharjo, Gedong Tataan, Kedondong dan Way Lima. |
| 4 | Rayon Kalirejo | Anak Tuha, Kalirejo, Sendang Agung, Padang Ratu dan Pubian. |
| 5 | Rayon Kota Agung | Bulok, Kota Agung Barat, Kota Agung Pusat, Kota Agung Timur, Limau, Pematang Sawa, Wonosobo dan Pardasuka. |
| 6 | Rayon Talang Padang | Air Naningan, Bandar Negeri Semuong, Cukuh Balak, Gisting, Pugung, Pulau Pugung, Semaka, Sumberejo, Talang Padang dan Ulubelu. |
| 7 | Rayon Rumbia | Rumbia, Seputih Agung, Seputih Banyak dan Seputih Surabaya. |
| 8 | Rayon Sribawono | Bandar Sribawono, Braja Slebah, Bumi Agung, Gunung Pelindung, Jabung, Labuhan Meringgai, Labuhan Ratu, Martatiga, Mataram Baru, |

| | | |
|---|---|---|
| | | Melinting, Pasir Sakti, Way Bungur, Way Jepara dan Waway Karya. |
| 9 | Rayon | Pekalongan, Raman Utara, Sukadana, Punggur, Probolinggo, Gunung Sugih, Kota Gajah, Seputih Raman dan Seputih Mataram. |

Sumber: PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung

Tabel 5. Rayon dibawah PT. PLN (Persero) Area Kota Bumi.

| NO | Rayon | Melayani |
|---|---|---|
| 1 | Rayon Bumi Agung | Abung Barat, Abung Kunang, Abung Pekurun, Abung Selatan, Abung Semuli, Abung Surakarta, Abung Tengah, Abung Timur, Abung Tinggi, Blambangan PAgar, Bunga MAyang, Hulu Sungai, Kotabumi Kota, Kotabumi Selatan, Kotabumi Utara, Muara Sungkai, Sungkai Barat, Sungkai Jaya, Sungkai Selatan, Sungkai Tengah, Sungkai Utara, Negara Batin, Negeri Agung, Negeri Besar dan Pakuan Ratu. |
| 2 | Rayon Menggala | Banjar Agung, Banjar Margo, Gedung Aji, Gedung Meneng, Menggala, Penawar Aji, Penawar Tama, RAwajitu Selatan, Rawa Jitu Timur, Rawa Pitu Mesuji, Mesuji Timur, Panca Jaya, Rawa Jitu Utara, Simpang Pematang, Tanjung Raya, Way Serdang Gunung Agung, Gunung Terang, Lambu Kibang, Pagar Dewa, Tulang Bawang Tengah, Tulang Bawang Udik, Tumi Jajar dan Way Kenanga. |
| 3 | Rayon Bukit Kemuning | Bukit Kemuning dan Tanjung Raya. |
| 4 | Rayon Blambangan Umpu | Bahuga, Banjit, Baradatu, Blambangan Umpu, Buay Bahuga, Bumi Agung, Gunung Labuhan, Kasui, Rebang Tangkas dan Way Tuba. |
| 5 | Rayon Liwa | Balik Bukit, Batu Brak, Belalau, Bengkunat, Bengkunat Blimbing, Gedung Surian, Karya Penggawa, Lemong, Ngambur, Pesisir Selatan, Pesisir Tengah, Pesisir Utara, Sekincau, Sukau, Sumber Jaya, Suoh, Way Krui, Way Saral dan Way Tenong. |

Sumber: PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung

**Pengembangan Pembangkit dan Transmisi**

**a. Pembangkit**

Tabel 6. Kapasitas Pembangkit milik PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung

| NO | PROYEK | KAPASITAS (MW) | COD |
|---|---|---|---|
| 1 | PLTU Sebalang | 200 | 2013 |
| 2 | PLTU Lampung Tengah | 14 | |
| 3 | PLTG/MG Lampung Peaker | 200 | 2015 |
| 4 | PLTU Tarahan #5.6 | 240 | |
| 5 | PLTA Semangka (FTP 2) | 56 | 2016 |
| 6 | PLTP Ulubelu #3.4 (FTP 2) | 110 | 2016 & 2017 |
| 7 | PLTP Rajabasa (FTP 2) | 220 | 2017 |
| 8 | PLTP Suoh Sekincau | 220 | 2018 & 2019 |

Sumber: PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung

**b. Transmisi**

1. Interkoneksi jalur timur transmisi 150 kV Gunawang – Menggala.
2. Intekoneksi Jawa – Sumatera HVDC 500 kV.

Menurut Eric Hiariej (2006:93), peran negara sebagai agen pembangunan dapat dilihat dengan dua cara. *Pertama*, negara turut berpartisipasi secara langsung dalam memupuk modal dengan cara mempunyai sumber daya finansial dan menanam kapital di berbagai sektor usaha melalui perusahaan-perusahaan negara. *Kedua*, negara turut serta berpartisipasi secara tidak langsung melalui perencanaan, pembuatan regulasi dan pelaksanaan kebijakan.

PT. PLN (Peresro) merupakan Badan Usaha mIlik Negara (BUMN). Perusahaan negara memiliki posisi dalam struktur perekonomian Indonsia. Perusahaan negara berperan penting dalam mengendalikan sektor-sektor usaha yang mencakup produksi sumber daya alam, infrastruktur, manufaktur, perbankan dan barang-barang kebutuhan pokok.

## II. Keadaan Pasokan Listrik di Lampung

Provinsi Lampung memiliki beberapa pembangkit listrik yang tersebar di beberapa Kabupaten/Kota yang terletak di Lampung. Berikut ini adalah keadaan pasokan listrik yang dihasilkan oleh beberapa pembangkit listrik di Lampung, yaitu:

Tabel 7. Daya Mampu Pembangkit milik PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung

| NO | Jenis Pembangkit | Nama Pembangkit | Kabupaten/Kota | Daya Mampu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) | PLTA Besai | Lampung Barat | 90,00 MW. Daya yang terpasang 2x46,4 MW. |
| 2 | Pembangkit Listrik Tenaga Panas (PLTP) | PLTP Ulubelu | - | 110 MW |
| 3 | Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD | PLTD Teluk Betung | Kota Bandar Lampung | 7 MW |
| 4 | Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) | PLTD Tegineneng | Pesawaran | 12 MW |
| 5 | Pembangkit Listik Tenaga Diesel/Gas (PLTD/G) | PLTD/G Tarahan | Lampung Selatan | 27 MW |
| 6 | Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) | PLTU Tarahan | Lampung Selatan | 2 x 100 MW |
| 7 | Pembangkit istrik Tenaga | PLTU Sebalang | - | 2 x 100 MW |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Listrik Uap (PLTU) | | | |

Sumber: PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung

PT. PLN (Persero) yang terletak di Provinsi Lampung juga memiliki PLTD SEWA. PLTD merupakan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel. Jumlah total Daya Mampu (DM) Sewa yang ada di Provinsi Lampung adalah sebesar 80 MW. Berikut ini adalah beberapa PLTD yang ada di Provinsi Lampung, yaitu:

Tabel 8. Daya Mampu (DM) Sewa Pembangkit milik PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung

| NO | Nama Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) | Daya Mampu (DM) Sewa |
|---|---|---|
| 1 | PLTD Sutami | 30 MW |
| 2 | PLTD Tarahan | 10 MW |
| 3 | PLTD Tegineneng | 20 MW |
| 4 | PLTD Talang Padang | 10 MW |
| 5 | PLTD Wonosobo | 5 MW |
| 6 | PLTD Krui | 5MW |

Sumber: PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung

PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung belum bisa mandiri dalam menghasilkan dan memenuhi kebutuhan pasokan daya listrik di Provinsi Lampung. Semua pembangkit listrik yang ada di Provinsi Lampung (PLTA Besai, PLTP Ulu Belu, PLTD Teluk Betung, PLTD Tegineneng, PLTU Tarahan, PLTU Sebalang, PLTD/G Tarahan, dan PLTD Sewa) masih memiliki keterbatasan dalam pengoperasiannya. Semua mesin pembangkit yang beroperasi di Lampung belum mampu untuk mencukupi kebutuhan pasokan listrik yang ada di Provinsi Lampung.

Kapasitas pasokan daya listrik yang tersedia di Lampung lebih besar dari kebutuhan pasokan daya listrik pada saat mencapai beban puncak. Kapasitas pasokan daya listrik yang tersedia di Lampung adalah sebesar 774 MW.

Kebutuhan pasokan daya listrik pada saat beban puncak adalah sebesar 710 MW. Kita dapat melihat bahwa jumlah cadangan daya (defisit) pasokan listrik yang ada di Lampung adalah sebesar 64 MW. Pasokan daya listrik dikirim dari Sumatera Selatan untuk mencukupi kebutuhan pasokan daya listrik Lampung. Sumatera Selatan mengirim pasokan daya listrik sebesar 250 MW. Sumatera Selatan memiliki pasokan listrik yang berlimpah. Sumatera Selatan memiliki persediaan batubara dan gas bumi yang melimpah yang dapat membantu pengoperasian pembangkit listrik.

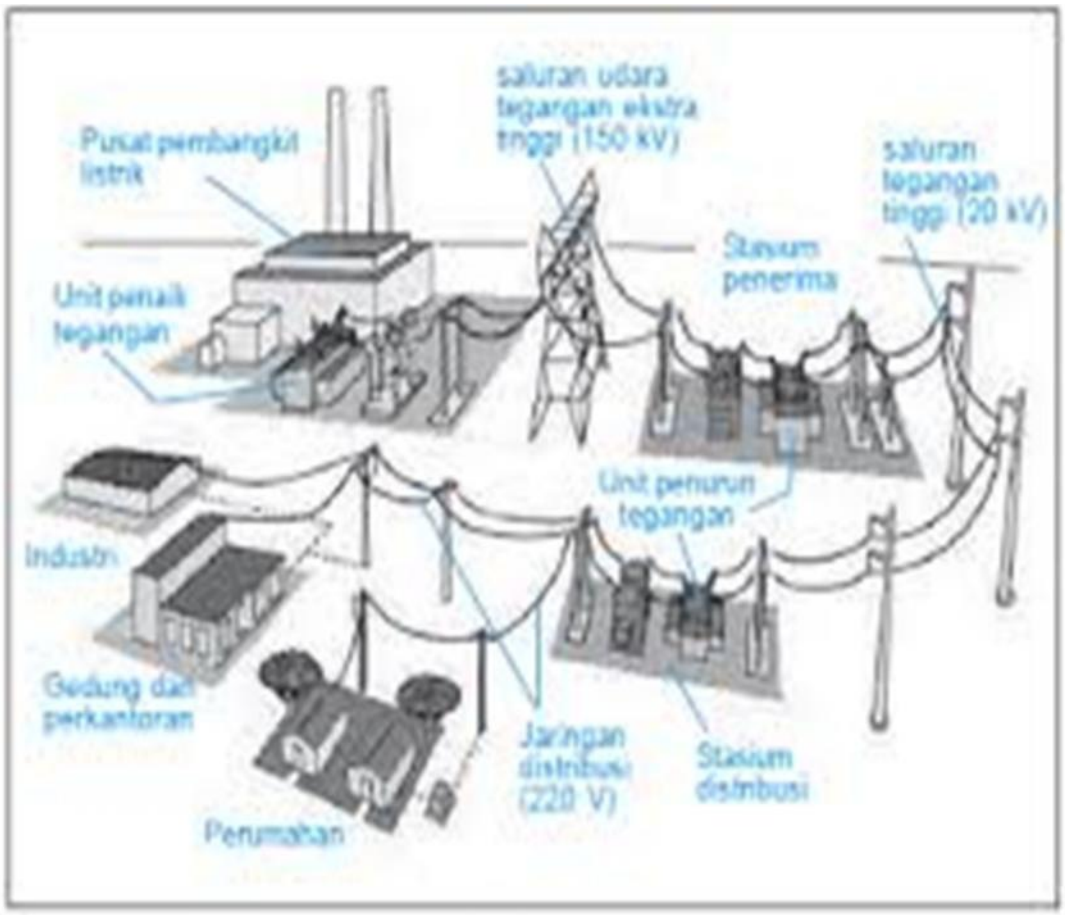


Diagram transmisi daya listrik jarak jauh.

Gambar 4. Diagram Transmisi Listrik Jarak Jauh

Berikut ini adalah pasokan daya sub-sistem Lampung, yaitu:

a. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Besai menghasilkan pasokan daya listrik sebesar 90 MW.
b. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batu Tegi menghasilkan pasokan daya listrik sebesar 25 MW
c. Tarahan memiliki 3 jenis pembangkit listrik, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), dan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD). Pembangkit listrik Tenaga Uap (PLTU) Tarahan menghasilkan pasokan daya listrik sebesar 180 MW. Pembangkit Lisrik Tenaga Gas (PLTG) Tarahan menghasilkan pasokan daya listrik sebesar 16 MW. Pembangkit listrik Tenaga Diesel (PLTD) Tersebar menghasilkan pasokan daya listrik sebesar 30 MW.
d. Pembangkit Listrik Tenaga Panas (PLTP) Ulu Belu menghasilkan pasokan daya listrik sebesar 105 MW.
e. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Sewa menghasilkan pasokan daya listrik sebesar 78 MW.
f. Excess Power menghasilkan pasokan daya listrik sebesar 12MW.
g. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sebalang menghasilkan pasokan daya listrik sebesar 180 MW.
h. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Lampung Tengah menghasilkan pasokan listrik sebesar 14 MW.

Provinsi Lampung membutuhkan pasokan daya listrik yang mencapai 800 MW. Jumlah tersebut harus dapat terpenuhi agar Provinsi Lampug dapat terbebas dari pemadaman bergilir. Kebutuhan pasokan listrik di Provinsi Lampung sudah

mencapai 774 MW pada saat beban puncak. Jumlah pelanggan PT. PLN (Persero) mencapai 1,5 Juta pelanggan pada tahun 2013. Jumlah pelanggan PT. PLN (Persero) diperkirakan dapat mencapai 2.000.000 KK pada tahun 2015. Jumlah ini merupakan suatu peningkatan yang hampir mencapai 40 % per tahun. Data ini diungkapkan oleh Made Artha selaku GM PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung dalam situs Haluan Lampung (Haluan Lampung, 7 Juni 2014).

PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung memiliki jumlah pelanggan yang beragam. Pelanggan PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung terdiri dari beberapa kalangan. Jumlah pelanggan PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung untuk sosial kecil adalah 27.075 pelanggan. Jumlah pelanggan PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung untuk sosial besar adalah 1.563 pelanggan. Jumlah pelanggan PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung untuk rumah tangga sangat kecil (450-900 VA) adalah 1.286.944 pelanggan. Jumlah pelanggan PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung untuk rumah tangga kecil (1.300-2.200 VA) adalah 110.373 pelanggan. Jumlah pelanggan PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung untuk rumah tangga besar adalah 7.447 pelanggan. Jumlah pelanggan PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung untuk bisnis kecil adalah 17.661 pelanggan. Jumlah pelanggan PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung untuk bisnis besar adalah 13.661 pelanggan. Jumlah pelanggan PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung untuk bisnis sangat besar adalah 66 pelanggan. Jumlah pelanggan PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung untuk industri kecil adalah 8 jiwa. Jumlah pelanggan PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung untuk industri menengah  adalah 252 pelanggan. Jumlah pelanggan PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung untuk industri besar adalah 236 pelanggan. Jumlah pelanggan PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung untuk kantor

pemerintah kecil adalah 1.372 pelanggan. Jumlah pelanggan PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung untuk kantor pemerintah menengah adalah 1.417 pelanggan. Jumlah pelanggan PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung untuk kantor pemerintah besar adalah 11 pelanggan. Jumlah pelanggan PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung untuk pelanggan lain-lain adalah 3.821 pelanggan. (Antara Sumsel, 10 Juni 2014).

Jumlah palanggan PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung setiap tahun selalu mengalami peningkatan. Pertumbuhan permintaan pemasangan listrik di Lampung mencapai 12 %. Daftar tunggu calon pelanggan PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung mencapai 123.725 calon pelanggan. Jumlah daftar calon pelanggan akan semakin meningkat. Para pelanggan tidak dapat menikmati jasa aliran listrik PT. PLN (Persero). Pemasangan listrik ke desa-desa tidak akan terealiasasi jika persoalan utama energi listrik di Lampung tidak dapat diselesaikan. Hal ini terjadi karena jumlah pasokan daya listrik yang rendah (Haluan Lampung, 7 Juni 2014).

Provinsi Lampung saat ini memiliki jumlah pasokan daya listrik yang masih dalam kondisi defisit. Provinsi Lampung memiliki defisit sebesar100-150 MW. Kebutuhan pasokan listrik di Provinsi Lampung diprediksi akan mencapai 1000 MW pada tahun 2015. Data ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad beberapa waktu lalu. Ketua Komisi II DPRD Lampung Ahmad Junaidi Auli memperkirakan Provinsi Lampung akan selalu mengalami krisis listrik hingga tahun 2015 (Theglobejurnal, 10 Juni 2014).

Direktur Perencanaan dan Pembinaan PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung Murtaqi Syamsudin, menegaskan bahwa Provinsi Lampung saat ini sedang mengalami krisis listrik. Kebutuhan pasokan daya listrik di Provinsi Lampung semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan elektrisasi dan industrialisasi di Provinsi Lampung. Murtaqi memperkirakan pertumbuhan kebutuhan listrik di Lampung bisa mencapai 8-10 % per tahun. Kondisi ini memerlukan ketersediaan kapasitas yang lebih besar lagi. Provinsi Lampung akan terus mengalami krisis listrik (Antara Sumsel, 10 Juni 2014).

Beberapa daerah di Lampung mengalami kekurangan pasokan aliran listrik. PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung telah melakukan upaya untuk memenuhi kebutuhan listrik warga. PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung terpaksa menerapkan pemadaman bergilir di sejumlah wilayah di Lampung. PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung sering melakukan pemadaman bergilir dalam satu bulan terakhir. Sejumlah warga di Lampung mengeluhkan kinerja PT. PLN (Persero) setempat. Informasi ini diperoleh dalam situs Indosiar (Indosiar, 10 Juni 2014).

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung melayangkan somasi kepada PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung. PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung sebagai perpanjangan tangan negara dalam hal penyediaan listrik seharusnya memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Faktanya, banyak pelanggan PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung mengadu pelayanan buruk yang diberikan oleh PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung. Selama ini, PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung selalu melakukan pemadaman bergilir. Para

pelanggan PT. PLN (Persro) Distribusi Lampung mengalami kerugian yang cukup signifikan. Berikut ini adalah pendapat Wahrul Fauzi Silalahi selaku Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung yang dimuat dalam situs Teras Pos (Teras Pos, 10 Juni 2014), yaitu:

> "Wahrul mengatakan, berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, masyarakat selaku pelanggan wajib mendapatkan kompensasi apabila telah dirugikan oleh penyedia jasa aliran listrik tersebut.
> Dia juga mengatakan, PLN seharusnya bisa mempergunakan hak intervensinya sebagai perusahaan negara guna melakukan pembangunan infrastruktur pembangkit listrik."

Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Lampung memanggil pihak PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung. Pernyataan ini diungkapkan oleh Zulherni pada tanggal 11 Maret 2014. Zulherni selaku Kepala Ombudsman RI Perwakilan Lampung mengatakan pemanggilan tersebut terkait dengan tidak transparannya informasi mengenai pemadaman dan penyebabnya. Ombudsmen Republik Indonesia (RI) Perwakilan Lampung meminta pihak PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung lebih massif dalam melakukan jadwal pemadaman listrik. (Saibumi, 10 Juni 2014).

> "Krisis listrik di Lampung terjadi semakin menjadi dalam beberapa waktu terakhir. Bahkan, di beberapa wilayah, pemadaman listrik nyaris terjadi tiga kali sehari dengan intensitas sedikitnya dua jam. Kondisi tersebut dikeluhkan oleh sejumlah pengguna listrik karena pemadaman berlangsung pada tengan malam hingga pagi hari." (Saibumi, 10 Juni 2013)."

Menurut Manajer Bidang Teknik PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung Yudi Winarni, mengatakan pemadaman listrik pada siang hari terpaksa dilakukan. Sejak satu bulan terakhir, PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung telah melakukan pemadaman bergilir pada malam hari. PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung

menggunakan pola tiga hari menyala satu hari padam. Berikut ini adalah kutipan informasi yang dimuat dalam situs Indosiar (Indosiar, 10 Juni 2014),ysitu:

> "Sejumlah warga di Lampung mengeluhkan kinerja pelayanan PT. PLN (Persero) setempat, menyusul seringnya pemadaman listrik dalam satu bulan terakhir.
> Apalagi pemadaman listrik juga terjadi pada siang hari atau pada jam kerja, hingga menyebabkan aktivitas perekonomian Lampung terganggu. Sedangkan sejumlah SPBU juga terpaksa menghentikan aktivitas pengisian Bahan Bakar Minyak, karena mesin pencatat tidak bisa beroperasi."

Para pelanggan PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung mengeluhkan tentang pemadaman listrik yang sering terjadi secara bergilir di Provinsi Lampung. Pemadaman listrik secara bergilir sebelumnya berlangsung sejak awal Maret hingga awal April. Menurut Alam Awaludin selaku Deputi Manajer Teknik PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung, menjanjikan pemadaman bergilir yang terjadi di Provinsi Lampung akan berakhir pada 21-27 Mei mendatang. Berikut ini adalah pernyataan Alam Awaludin yang dikutip dalam situs Sinar Harapan (Sinar Harapan, 7 Juni 2014), yaitu:

> "Menurutnya, pemadaman diakibatkan pemeliharaan berupa penggantian seluruh jaringan kabel, yang menjadi penghubung pasokan listrik (interkoneksi) dari Sumatera Selatan menuju Provinsi Lampung, yang masih dan tahap pengerjaan.
> Kabel jaringan yang diganti adalah model baru dengan jenis ACSR240, yang memiliki kemampuan daya serap tegangan, atau pengantar arus listrik yang lebih tinggi dari kabel lama, karena fisik kabelnya lebih lentur dan tidak mudah patah."

Peningkatan kapasitas pergantian kawat konduktor (rekonduktoring) tiang SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi) melalui Bukit Asam-Bukit Kemuning dipercepat. PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung menjamin pelaksanaan proyek tersebut selesai tepat waktu pada 21 Mei 2014. Peningkatan kapasitas kawat konduktor (rekonduktoring) bertujuan untuk meningkatkan keandalan pasokan

daya listrik untuk mendukung pertumbuhan pelanggan baru di sektor industri, hotel maupun rumah tangga. Berikut ini adalah pernyataan yang diungkapkan oleh I Made Artha selaku General Manajer (GM) PT.PLN (Persero) dalam situs Radar Lampung (Radar Lampung, 7 Juni 2014).

> "Kawat konduktor yang ada sekarang ini baru mampu menghantarkan listrik sebesar 150 kilovolt (kv). Padahal jika terus dipaksakan mengangkat beban maksimum, kawat konduktor sangat rentan putus sehingga bakal lebih mengganggu pasokan listrik ke Lampung.
> Karena itu, dengan segala konsekuensi yang ada, kami menetapkan pergantian kawat konduktor menjadi 250 kv itu dilakukan sekarang. Setelah rekonduktoring dilaksanakan, maka dua sirkuit yang sebelumnya hanya mampu menghantarkan 250 MW (megawatt) akan naik kemampuan menghantarnya hingga 500 MW."

Pemadaman listrik yang dilakukan secara bergilir menyebabkan Provinsi Lampung menjadi gelap gulita. Sistem Interkoneksi Sumatera (SIS) mengalami gangguan. Gangguan yang terjadi pada Sistem Interkoneksi Sumatera (SIS) mengakibatkan sebagian besar wilayah di Provinsi Lampung mengalami pemadaman total (*black out*). Gangguan pada Sistem Interkoneksi Sumatera (SIS) terjadi akibat kerusakan di Gardu Induk (GI) Menggala, Tulang Bawang, Lampung. Pernyataan ini diungkapkan oleh I Ketut Darpa selaku Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) dalam situs Berita Satu (Berita Satu, 7 Juni 2014).

Menurut I Ketut Darpa selaku Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) yang dimuat dalam situs Berita Satu (Berita Satu, 7 Juni 2014), Gangguan yang terjadi pada Sisitem Interkoneksi Sumatera (SIS) mengakibatkan Provinsi Lampung mengalami defisit listrik. Jumlah total kebutuhan pasokan daya listrik pada saat beban puncak (antara pukul 17.00 WIB hingga 23.00 WIB) adalah

sebesar 710 MW. Ketergantungan PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung terhadap Sistem Interkoneksi Sumatera (SIS) masih cukup besar. Tujuh pembangkit listrik yang ada belum mampu memenuhi kebutuhan daya pasokan listrik di daerah tersebut. Provinsi Lampung mengalami defisit listrik sebesar 250 MW (Berita Satu, 7 Juni 2014).

> "Sementara itu, untuk mengatasi defisit daya listrik, PLN saat ini sedang membanguan beberapa pembangkit listrik. Antara lain PLTU Tarahan Unit 1 dan 2 dengan kapasitas 2 x 100 MW, PLTU Sebalang dengan Kapasitas 2 x 100 MW, PLTU Ulubelu Unit 1 dan 2 dengan kapasitas 2 x 55 MW. Sejumlah pembangkit juga direncanakan dipercepat pembangunannnya. Antara lain PLTP RAjabasa Unit 1 dan 2 berkapasitas 2 x 55 MW (rencana pembangunan pada 2012/2013, saat ini sumber panas bumi masih dalam tahap pelelangan), PLTP Way Ratai Unit 1 dan 2 berkapasitas 2 x 3 MW. PLN juga melakukan optimalisasi PLTU Batutegi berkapasitas 2 x 14 MW. Agar operasi bisa secara maksimal, dibuatkan bendungan di Sungai Way Sekampung (lokasinya di antara Waduk Batutegi-Bendung Argoguruh)."

I Ketut Darpa selaku Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung mengatakan bahwa perbaikan PLTU Tarahan Unit 3, pemeliharaan boiler PLTU Tarahan Unit 4 dan pemeliharaan PLTA Way Besai Unit 1 belum sepenuhnya selesai. PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung melalui siaran pers (23/2), memperkirakan perbaikan PLTU Tarahan Unit 3 selesai pada 28 Februari 2014. Pemeliharaan boiler PLTU Tarahan Unit 4 selesai pada 27 Februari 2014. Pemeliharaan PLTA Way Besai Unit 1 selesai pada 1 Maret 2014. PLTU Tarahan Unit 3 dan PLTA Way Besai Unit 1 sudah mulai memberikan pasokan daya listrik . Pasokan daya listrik yang diberikan oleh PLTA Way Besai, PLTU Tarahan dan PLTA Way Besai belum optimal karena masih dalam proses perbaikan (Kupas Tuntas, 9 Juni 2014).

Menurut pendapat yang diungkapkan oleh Sumargo selaku Deputi Manajer Komunikasi PT. PLN (Persero) Wilayah Lampung saat ditemui Selasa (17/3) PLTA Way Besai sudah tidak bisa optimal lagi menghasilkan pasokan daya listrik. PLTA Batu Tegi sudah tidak memproduksi daya pasokan listrik karena cadangan air yang tersedia lebih diprioritaskan untuk pertanian, bukan untuk pembangkit listrik. Produksi PLTU Tarahan menurun dalam dua pekan terakhir. Corong pengisi batu bara mengalami penyumbatan menuju arah ruang bakar. Bahan bakar yang akan dibakar masih basah. Menurut Bargowo Jatmiko selaku Manajer Sektor Pembangkitan Tarahan PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung, mengatakan bahwa pihak pengelola pembangkitan Tarahan telah mengupayakan pembersihan corong yang tersumbat oleh batu bara. Pengisi batu bara 4A, 4B dan 4C telah dibersihkan. Pembangkit unit 3 yang telah selesai dibersihkan adalah corong pengisi 3A dan 3B (Alpen Steel, 7 Juni 2014).

Perusahaan negara memiliki posisi dan struktur dalam perekonomian Indonesia. Kesulitan fiskal bukanlah penghalang bagi sektor-sektor yang berkaitan dengan sumber daya alam dan sektor-sektor domestik lainnya. Hal yang paling penting adalah negara berupaya untuk menyediakan kesempatan bisnis baru yang menggiurkan kepada kelas kapitalis (Hiariej, 2006:103).

Pembangunan tiang SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi) merupakan solusi yang di tawarkan oleh PT. PLN (Persero) dalam mengatasi minimnya pasokan listrik di Provinsi Lampung. Jumlah palanggan PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung setiap tahun selalu mengalampi peningkatan. Pembanguan tiang SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi) berupaya untuk

menyediakan kesempatan bisnis baru yang menggiurkan kepada kelas kapitalis. Pembangunan tiang SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi) yang melintasi areal perkebunan PT. *Sugar Group Companies (SGC)* menyerap banyak tenaga kerja.